



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 25 November 2024

Halaman: 5

► MASA TENANG PILKADA

Ribuan APK Mulai Dicotot

UMBULHARJO—Masa Tenang Pilkada 2024 dimulai Minggu (24/11). Untuk menjaga suasana tetap kondusif, Satpol PP Kota Jogja memetakan sekaligus menerbitkan alat peraga kampanye (APK) milik pasangan calon (paslon). Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat, menuturkan penertiban APK digelar mulai Minggu. Berdasarkan pendataan, ada sekitar 5.000 APK yang diterbitkan. "Berdasarkan data Bawaslu, ada sekitar 5.000 APK yang masuk rekomendasi untuk diterbitkan. Pendataan yang dilakukan panwastu sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu," ujar Octo, akhir pekan kemarin.

Menurut Octo, penertiban melibatkan Satpol PP BKO di 14 kementren. Penertiban tak hanya fokus di jalan protokol, tetapi juga di jalan kampung. "Harapan kami sebelum 27 November atau sebelum pencoblosan, wilayah Kota Jogja sudah bersih dari APK," ujarnya.

Pemeriksaan Dihentikan

Sementara, Bawaslu Kota Jogja menghentikan penelusuran laporan dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh salah satu tim paslon dalam pilkada Kota Jogja. Langkah ini diambil karena terlapor tidak hadir saat deklarifikasi.

Ketua Bawaslu Kota Jogja, Andie Kartala, menjelaskan jajarannya menghentikan penelusuran laporan dugaan politik uang yang masuk beberapa waktu lalu. "Kami menghentikan prosesnya," katanya saat dikonfirmasi, akhir pekan kemarin.

Unsur pidana dalam laporan ini tidak terpenuhi karena terlapor dan saksi-saksi tidak memenuhi panggilan klarifikasi. "Terlapor dan sejumlah saksi yang kami panggil untuk klarifikasi tidak datang ke Bawaslu, sehingga proses penelusuran dugaan politik uang tidak bisa dilanjutkan," kata Andie.

Sebelumnya, laporan dugaan politik uang masuk dari seorang warga Warungboto, Umbulharjo, pada Rabu (6/11). Laporan ini menyebutkan adanya praktik politik uang dari kegiatan kampanye salah satu paslon berupa pembagian sembako kepada warga.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Jogja, Jantan Putra Bangsa, menuturkan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu dimulai dari rapat pleno untuk memastikan kelengkapan informasi dan penelusuran. Dalam penelusuran, Bawaslu membuat tim untuk terjun ke lapangan mencari keterangan. Jika tidak ditemukan detail informasi sebagai syarat materiel, maka informasi awal tidak bisa dilanjutkan ke registrasi.

Dalam proses penanganan di Sentra Gakkumdu, terlapor juga tidak selalu kooperatif. Ketika mengundang terlapor untuk klarifikasi, terkadang terlapor tidak mau memenuhinya. Jika pemanggilan kedua tidak juga dipenuhi terlapor, maka Bawaslu tidak bisa memaksa dan tidak bisa memberikan sanksi langsung.

(ARI Annissa Karin & Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005